

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Implementation Of Mining Management Policy
Gold Without License In Kuantan Singingi District*



OLEH :

TRIO SAPUTRA
NIM : 1171800011

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Implementation Of Mining Management Policy
Gold Without License In Kuantan Singingi District*



Oleh :

TRIO SAPUTRA
NIM: 117180011

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA**

2022

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Administrasi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Di Susun Oleh :

TRIO SAPUTRA
NIM: 117180011

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA**

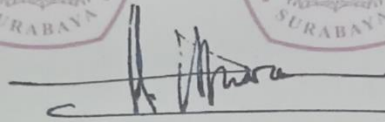
2022

SDISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Implementation Of Mining Management Policy
Gold Without License In Kuantan Singingi District*

Promotor :



Prof. Dr. Arif Darmawan . SU

Co Promotor :



Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

Disusun Oleh :

TRIO SAPUTRA

NIM: 117180011

**Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP

**Mengesahkan,
Kaprosdi**

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

TELAH DI TETAPKAN PANITIA PENGUJI DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
ADMINISTRASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
PADA TANGGAL 14 MARET 2022

Panitia Penguji:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA

2. Dr. Dra. Ayun Maduwiniarti, MP

3. Prof. Dr. Arif Darmawan, SU

4. Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

5. Prof. Dr. V Rudy Handoko, MS

6. Dr. Achluddin Ibnu Rochim, S.H.M.Si

7. Prof. Dr. Roesminingsih, M.Pd.

8. Dr. Falih Suaedi, M.Si

9. Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, SH., MM


10. Dr. Andik Matulesy, Msi

Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui,
Dekan

Mengesahkan,
Kaprodi


Dr. Dra. Ayun Maduwiniarti, MP


Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S

**PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trio saputra
Alamat : Jl. Ega V No.5 Marsan Selatan
Email : trio_saputra@unilak.ac.id
Telepon/HP : 085364465335

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** Adalah murni gagasan, rumusan, pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan dunia pendidikan.

Surabaya, 14 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Trio Saputra
NIM: 117180011



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpustakaan@ug-45.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THO SAPUTRA
 NBI/ NPM : 1171900011
 Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Pretek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA RIN DI KABUPATEN
KANTAU SINGINGI

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : PERANGABU
 Pada tanggal : 30 MARET 2022



THO SAPUTRA

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Desertasi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, tidak mungkin disertasi ini selesai tanpa bantuan serta dorongan pihak lain. Oleh karena itu dengan selesainya disertasi ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Zakariya, MS.,MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Arief Darmawan, SU, selaku dosen Promotor Disertasi program studi doktor ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 17 agustus 1945 surabaya.
5. Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM, selaku Ko Promotor Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S; Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH, M.Si.; Dr. Zakariya, MS.,MM; Prof. Dr. Roesminingsih, M.Pd; Dr. Falih Suaedi, M.Si yang telah menguji dan memberikan masukan konstruktif terhadap disertasi ini.
7. Gubernur Provinsi Riau Bapak Drs. Syamsuar, M.Si, yang telah memberikan Beasiswa dan izin dalam penelitian ini.
8. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Drs. H. Mursini, M.Si Periode 2016-2021 yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Narasumber penelitian ini.

10. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan semangat, bantuan baik material maupun moral dan do'a restunya.

11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam hal apapun hingga terselesaikan penyusunan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis menghargai kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhirnya, semoga penyusunan disertasi ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, dan pembaca.

Surabaya, 16 Desember 2021

Trio saputra

NIM: 117180011

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu menyelesaikan masalah penambangan emas tanpa izin yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Karena menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem disekitarnya. Jaringan kerjasama multi aktor diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Untuk membuat Model Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *case study* atau studi kasus. Hasil penelitian menumakan Identifikasi dalam konteks ekonomi politik. Legalitas dan aturan pertambangan yang tidak jelas menyebabkan terjadinya pertambangan emas tanpa izin dan di dukung dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Management stakeholder masih di dominasi peran pemerintah sedangkan dalam peran aktor lainnya belum ada keseimbangan terutama masyarakat dalam upaya pendekatan persuasif. Joint visioning pemerintah daerah sebagai fasilitator jaringan belum sepenuhnya langsung mengawasi pelaksanaan kebijakan sebelum kebijakan di mulai maupun setelah kebijakan dilaksanakan. Koordinasi dalam jaringan kebijakan publik belum menjadi fokus dalam policy network theory sehingga menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Penambangan, Emas, Kebijakan, Kuantan Singingi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Penelaahan	iv
Surat Pernyataan Orisinilitas.....	v
Lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis.....	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Glossory	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Masalah Penelitian	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu..	17
2.2. Konsep dan Pendekatan Studi Implementasi Kebijakan.....	28
2.3. Model-model Implementasi Kebijakan.....	37
2.4. Penanggulangan Ilegal Mining..	73
2.5. Kerangka Pemikiran.....	77
2.6. <i>Critical Review</i>	80
BAB III: PROSEDUR PENELITIAN	
3.1. Landasan filosofi dan pendekatan penelitian..	89
3.2. Objek dan informan penelitian.....	92
3.3. Metode Pengumpulan Data	97
3.4. Teknik Analisis data.....	105
BAB IV: DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
4.1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.....	108
4.2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi.....	110
4.3. Keadaan Alam dan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	112
4.4. Keadaan Geografi Kabupaten Kuantan Singingi	114
4.5. Kondisi dan Sarana Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi	116
4.6. Sub Sektor Pertanian	120
4.7. Sarana Prasarana Transportasi dan Komunikasi	128
4.8. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi.....	129
4.9. Permasalahan yang di Timbulkan Akibat PETI.....	131
BAB V: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PETI	
5.1. Kebijakan Pertambangan di Indonesia..	142
5.2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan PETI.....	156

BAB VI: MODEL JEJARING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

6.1. Assesment kontekstual memahami lingkungan ekonomi politik..... 173
6.2. Identifikasi Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan. 179
6.3. Joint Visioning dalam Implementasi Kebijakan 183

BAB VII: TEMUAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN PROPOSISI

7.1. Komparasi hasil penelitian dengan teori kebijakan publik.. 187
7.2. Perbandingan temuan teori dengan penelitian sebelumnya. 195
7.3. Temuan Penelitian..... 198
7.4. Implikasi Penelitian..... 202
7.5. Keterbatasan Penelitian..... 204
7.6. Proposisi Penelitian..... 205
7.7. Originalitas dan Kebaharuan (Novelty) 207

BAB VIII: KESIMPULAN

8.1. Kesimpulan..... 220
8.2. Saran..... 221

DAFTAR PUSTAKA..... 222

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.....	7
Tabel 1.2 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	11
Tabel 2.1 Fokus Kajian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	110
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi	115
Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	117
Tabel 4.4 Jumlah pasar Kabupaten, pasar Kecamatan, dan pasar Desa di Setiap Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.....	119
Tabel 4.5 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi	120
Tabel 4.6 Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Palawija di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015	121
Tabel 4.7 Luas Tanam, Panen dan Produksi Sayur-sayuran di Kabupaten Kuantan Singingi	122
Tabel 4.8 Populasi Panen dan Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Tahun 2017	123
Tabel 4.9 Luas Tanaman Panen dan Produksi biofarmaka menurut jenis tanaman di kabupaten kuantan singingi tahun 2017.....	124
Tabel 4.10 Luas Area Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi	125
Tabel 4.11 Luas Area Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi	125
Tabel 4.12 Produksi Komoditas Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi	125
Tabel 4.13 Banyaknya Petani Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi.....	126
Tabel 4. 14 Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi	126
Tabel 4.15 Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	127
Tabel 4.16 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008–2015	127
Tabel 4.17 Luas Kolam, RTP Budidaya Kolam dan Produksi Budidaya Ikan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	128
Tabel 4.18 Jumlah Sarana Pendidikan Di kabupaten Kuantan Singingi	130
Tabel 5.1 Penyebaran Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi 2016 – 2020.....	166
Tabel 6.1 Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi	179
Tabel 7.1 Perbandingan temuan teori	195
Tabel 7.2 Fokus Penelitian, Temuan Metrik Proposisi Penelitian Dan Implikasi Teori	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Pertambangan Rakyat	4
Gambar 2. Perkembangan Luas kegiatan Penambangan Emas tanpa Izin	10
Gambar 3. Model Donald Van Meter & Carl Van Horn	40
Gambar 4. Model George III	43
Gambar 5. Danial Mazmanian dan Paul Sabatier	44
Gambar 6. Model Grindle	47
Gambar 7. Kerangka ekonomi politik Wamsley and Zald	59
Gambar 8. Tipologi Stakeholder	65
Gambar 9. Tipologi Stakeholders	67
Gambar 10: Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Ilegal Mining	79
Gambar 11. Peta wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.....	109
Gambar 12. Penambangan Emas Tanpa Izin Yang Dilakukan Masyarakat Dengan Menggunakan Mesin Dompeng	159
Gambar 13. PETI Dengan Menggunakan Alat Berat	159
Gambar 14. Sosialisasi Dampak PETI.....	170
Gambar 15. Pemusnahan Peralatan PETI	171
Gambar 16. Penindakan Pelaku PETI.....	163
Gambar 17. Model Kontekstual lingkungan ekonomi politik	173
Gambar 18. Model Joint Visioning dalam Implementasi Kebijakan.....	185
Gambar 19. Model Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Emas Tanpa Izin	219

GLOSSORY

PETI	Penambangan emas tanpa izin Usaha pertambangan skala kecil (terutama untuk bahan galian emas) dikenal sebagai pertambangan emas tanpa izin atau yang cenderung terutama menimbulkan kerusakan lingkungan
WPR	Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
Galian B	bahan galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak; Contoh bahan galian vital adalah besi, mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak
Dompeng	Alat untuk penambangan emas di sungai, berfungsi menyedot pasir dari dasar sungai, selanjutnya butiran emas akan dipisahkan dari butiran pasir dengan menggunakan merkuri.
IUP	Izin usaha pertambangan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
IUPK	Izin usaha pertambangan khusus yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan khusus
IPR	Izin pertambangan rakyat yaitu izin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
PERDA	Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)
SIPB	disebut surat izin pertambangan batuan
IP	disebut izin penugasan;
IPP	disebut Izin Pengangkutan dan Penjualan;
IUJP	disebut izin usaha jasa pertambangan
IUPP	disebut izin usaha pertambangan Penjualan
NPS	<i>New public service</i> menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (citizen)
NPM	<i>New public management</i> sistim manajemen pemerintahan yang baru dengan pendekatan bisnis
Organisasi	bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama
OPA	<i>Old public administration</i> pradigma administrasi publik dimana pemerintah terjun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam sistim tertutup
Stakeholders	pemanfaat/ pengguna program
Ekonomi politik	Suatu sistem mengandung arti adanya tatanan ekonomi politik yang dibangun di atas asas yang khas dengan unit-unit yang saling terhubung dan terpadu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Joint visioning	visi bersama